



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.01.2.02.0002.5.1.01.03.07.0001
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Nama Rekening : Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
Jumlah Anggaran (DPA) : 198,000,000.00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 198,000,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA

BULAN : AGUSTUS

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				90,200,000.00
2	01 Agustus 2024	00473	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (HONORARIUM PPKD/PA/KPA) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	2,590,000.00	87,610,000.00
3	01 Agustus 2024	00474	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (HONORARIUM PPTK) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	7,150,000.00	80,460,000.00
4	01 Agustus 2024	00475	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (PPK SKPD) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	990,000.00	79,470,000.00
5	01 Agustus 2024	00476	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (STAF/PEMBANTU PPK SKPD) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	2,310,000.00	77,160,000.00
6	01 Agustus 2024	00477	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (BENDAHARA PENGELUARAN) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	860,000.00	76,300,000.00
7	01 Agustus 2024	00478	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	1,500,000.00	74,800,000.00

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	15,400,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	107,800,000.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	123,200,000.00	



Disetujui Oleh,
PENGGUNA ANGGARAN

NIRMAN NISWAN MUNGKASA, S.T., M.Ap
NIP : 19730425 200502 1 001

Makassar, 30 Agustus 2024

Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN


SLNUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. JEND AHMAD YANI NO.02 MAKASSAR

Revisi : 00322/SPK/BLIT/PTD/2024
Perihal : Pemindahbukuan
Lampiran : 2

Makassar, 01 Agustus 2024
Revisi Tth:
PT. Bank SULSELBAR Cabang Utama Makassar

Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk memindahbukukan uang kami untuk ditransfer dari :

Rekening Bank : 130.002.0000316367
Atas Nama : BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Pada Tanggal : 01 Agustus 2024
Kepada pihak ketiga kami dengan tujuan sebagai berikut :

Rekening Bank : Rekening masing-masing penerima sesuai daftar terlampir
Atas Nama : Nama penerima sesuai daftar terlampir
NPWP :
Uraian : BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (PPK SKPD) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PEKERAWAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	REKONSILIASI KODE REKONSILIASI	URAIAN	JUMLAH
1	5.05.01.3.03.0002.5.1.01.03.07.0001	Sub kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jenis: Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan	990.000,00
Jumlah Pembukuan			990.000,00

POTONGAN

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILLING	JUMLAH
1	PPH 146.008.3109012006	PPH Pasal 21 (15%)	029171713922077	148.500,00
Jumlah Potongan				148.500,00

PAJAK

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILLING	JUMLAH
Jumlah Pajak				0,00
Nilai yang ditransfer				841.500,00

Uang sejumlah : (delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Makassar, 01 Agustus 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

STANILATSYAH BAH
NIP : 19800320 201410 2 001

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.01.2.02.0002.5.1.01.03.07.0001

Buku Kas No. : 00475

Tanggal : 1-8-2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Banyaknya Uang : == SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH ==

Untuk Pembayaran : BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (PPK SKPD) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024

DIKETAHUI / DISETUJUI
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

BENDAHARA PENGELUARAN


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

Jumlah Uang Rp. 990.000,-

MENGETAHUI

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SELAKU PPTK


YUDISTHIRA AZHARI, S.SOS, MM
NIP. 19810610 201001 1 021

Makassar, 1-8-2024
Yang Menerima,



NO. DAFTAR: 00204/505000000020000/2024

DAFTAR: BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (PPK SKPD) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor / Tanggal SK : 070.04/008/KEP/I/2024 / 08 Januari 2024

Kegiatan : 5.05.01.2.02 / Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.05.01.2.02.0002 / Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Rekening : 5.1.01.03.07.0001 / Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	BPJS Kesehatan 1%	Jaminan Hari Tua (JHT)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
1	HAIDIL ADHA, S.Sos 08.289.868.3-805.000 Rekening : 1462010000006893	Honorarium PPK SKPD	990.000	x 1		990.000			148.500		841.500	
	JUMLAH					990.000			148.500		841.500	

TERBILANG: SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH

Makassar, 1-8-2024

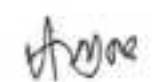
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

KASUBAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN SELAKU PPTK


YUDISTHIRA AZHARI, S.SOS, MM
NIP. 19810610 201001 1 021

BENDAHARA PENGELUARAN


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

PEMBUAT DAFTAR


FIRNAWATI, SE
NIP. 19770826 201212 2 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR

NOMOR : 070.04/008/KEP/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU : Penunjukan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
- KEDUA : Kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan tambahan penghasilan berupa honorarium bulanan yang berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Pemberian Honorarium Bulanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas dibayarkan setiap bulan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 pada belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 08 Januari 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR,



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, S.T., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19730425-200802 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Pertinggal.